



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Jl. Bukit Trikora No. 74 (0462) 2222121

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mengelola pendapatan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 – 2026.

Dengan telah tersusunnya LKjIP Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini.

Semoga LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ini dapat mencerminkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan



HENGKY DILENGAN, S.STP.M.Si
Pembina Tk. I., IV/b
Nip. 198507112003121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah selama Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dimaksudkan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator – indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 memiliki jumlah sasaran sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Diharapkan LKjIP ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja, sehingga tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan dapat tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
Bab. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4 Struktur Organisasi	4
1.5 Isu Strategis	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
Bab. II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	9
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda	10
2.1.3 Indikator Kinerja Utama	11
2.3 Perjanjian Kinerja	16
Bab. III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1 Capaian Pendapatan Asli Daerah	18
3.1.3 Alternatif Solusi yang telah dilakukan	36
3.1.4 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
3.2 Realisasi Anggaran	38

Bab. IV	PENUTUP	41
4.1	Kesimpulan	41
4.2	Saran	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap penyelenggara pemerintahan harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis.

Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban (accountability) setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya kepemimpinan yang baik (Good Governance) dalam perspektif yang lebih luas. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah –

langkah pada tahun berikutnya.

LKjIP Kabupaten Banggai disusun berdasarkan laporan dari LKjIP setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 kepada Bupati Banggai Kepulauan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun LKjIP untuk tahun anggaran 2024.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya, yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2024.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Banggai Kepulauan, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan .

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 65 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang Urusan Pendapatan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

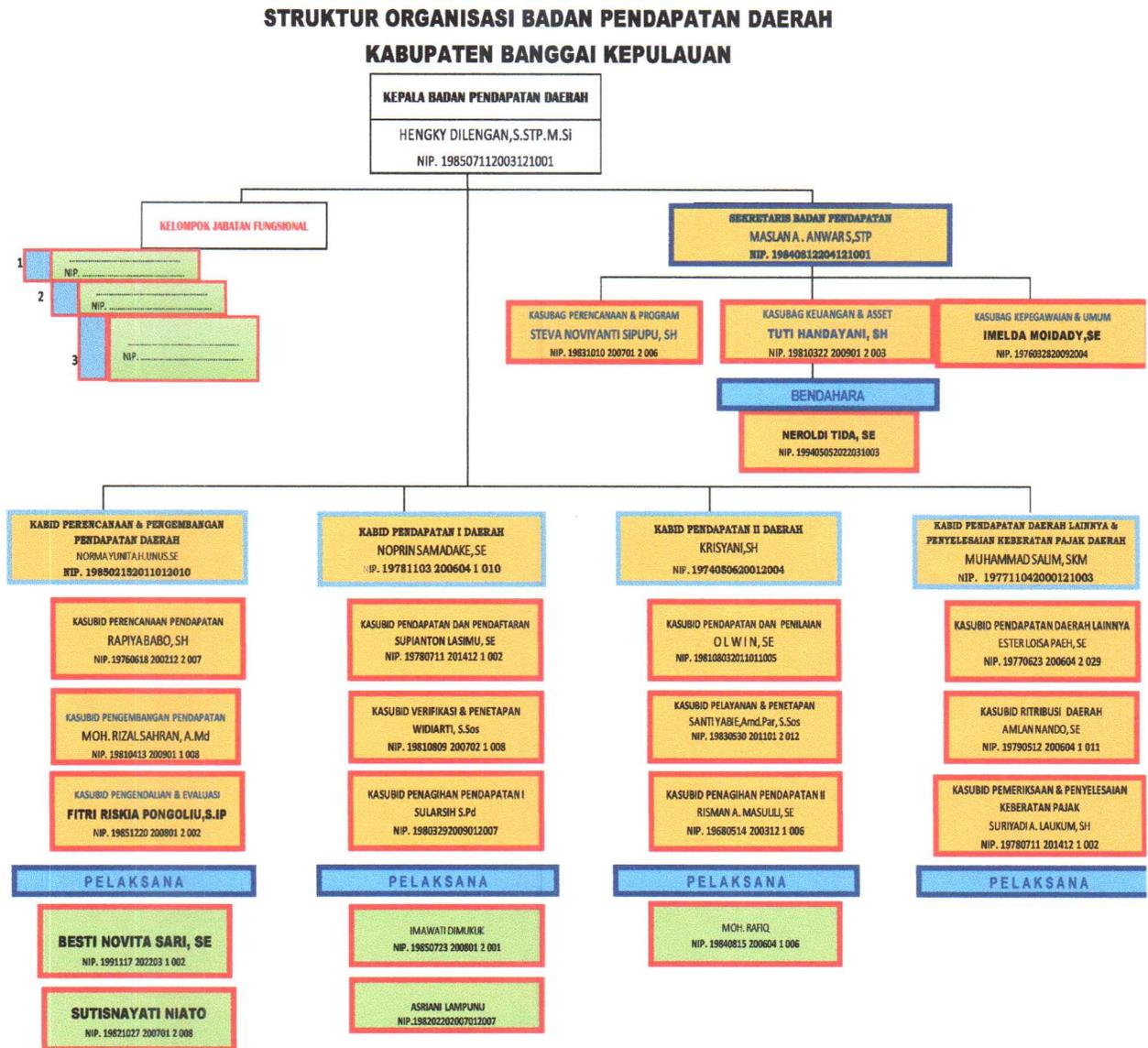
1.4 Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, maka susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang **Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah**, terdiri dari :
 - Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
 - Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
 - Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
4. Bidang Pendapatan I, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan
 - Sub Bidang Penagihan
5. Bidang Pendapatan II, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan
 - Sub Bidang Penagihan
6. Bidang **Pendapatan Lainnya dan Penyelesaian Keberatan**, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya
 - Sub Bidang Retribusi
 - Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Penyelesaian Keberatan Pajak. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar struktur organisasi Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



1.5 Isu Strategis

Dalam menentukan isu – isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Berikut beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan :

- a. Wajib pajak belum sepenuhnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran;
- b. Kurangnya Pemahaman terhadap tugas dan fungsi aparaturnya sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah;
- c. Belum ditetapkannya beberapa peraturan pelaksanaan pengelolaan pendapatan berupa Peraturan Bupati (Perbup) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga membuat pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana kantor, serta peralatan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- e. Belum dilaksanakan sistem dan prosedur secara optimal, sehingga kinerja mengalami hambatan dan belum sepenuhnya menunjang peningkatan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan PAD;
- f. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan PAD;
- g. Belum diterapkannya sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum secara tegas. Hal ini belum dapat menunjang meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan PAD;
- h. Terbatasnya anggaran yang tersedia guna menunjang optimalisasi PAD;

- i. Masih terbatasnya pengaplikasian integrasi system yang berbasis Teknologi Informasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bagian ini dijelaskan mengenai Rencana Strategis meliputi Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja, pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja), Capaian Indikator Kinerja Utama, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis serta Akuntabilitas Keuangan juga mengemukakan secara umum tentang tujuan, keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan serta strategi pemecahan masalah.
- BAB IV Penutup, pada bagian ini menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen – dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah menetapkan Rencana Rencana Pembangunan Daerah (RPD) RPD termaksud merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPD, Renstra dan Renja tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terutama dalam mendukung pencapaian Prioritas 4 Yaitu Optimalisasi pelayanan publik dan sektor pendukung ekonomi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Rencana strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah) karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Rencana tersebut disusun dan dilaksanakan oleh para manajer puncak dan menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Untuk itu dalam penerapannya di dalam sebuah organisasi, pejabat tertinggi perlu membuat suatu perencanaan strategis yang mana dikoordinasi dengan para pegawai untuk dijalankan bersama demi mencapai tujuan yang diinginkan dari sebuah organisasi. Rencana strategis sangat penting sehingga harus dirancang sendiri oleh masing – masing organisasi dengan memperhitungkan kondisi nyata dan sumber daya yang dimiliki, untuk menjadi landasan dan pedoman kerja bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan Badan Pendapatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan yaitu “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Tabel 2. Tujuan dan Indikator Tujuan dalam Renstra

Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Sumber : Renstra Bapenda Kab. Banggai 2023 – 2026

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Capaian peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak sekedar mengatur capaian realisasi terhadap target, melainkan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya, sehingga akan dihasilkan besarnya peningkatan atau pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun berjalan. Sasaran dan indikator sasaran Bapenda adalah sebagaimana Tabel 3. berikut :

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Sasaran dalam Renstra

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Renstra Bapenda Kab. Banggai 2023 - 2026

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Bapenda

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis diperlukan langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan merupakan tindakan – tindakan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan dapat bersifat internal maupun eksternal. Kebijakan bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program manajerial dalam konsep perencanaan, pengelolaan, pelayanan dan pengawasan. Sedangkan kebijakan bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat bergantung pada jelas tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki satu sasaran, yaitu :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dicapai melalui kebijakan meningkatkan pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melaksanakan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah, dicapai melalui kebijakan meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, evaluasi, administrasi keuangan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah yang berkualitas dengan melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bapenda dapat dilihat pada Tabel 4. berikut ini :

Tabel 4. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bapenda

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik BAPENDA	Nilai SAKIP Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Publik, Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Yang Terdiri Dari Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, Administrasi Keuangan, Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Yang Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Renstra Bapenda Kab. Banggai 2023 – 2026

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan – kegiatan yang mendukung tujuan strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 5. berikut :

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{PAD tahun n} - \text{PAD tahun n-1}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik BAPENDA	- Nilai SAKIB	
	- Indeks kepuasan masyarakat	

Sumber : Renstra Bapenda Kab. Banggai 2023 - 2026

Dalam penghitungan IKU dibutuhkan beberapa sumber data, diantaranya : (1) Laporan Realisas Pajak Daerah (2) Laporan Realisasi Retribusi Daerah; (3) Laporan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Laporan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (5) Laporan Dana Perimbangan; (6) Laporan Pendapatan lain-lain Daerah yang Sah; dan (7) Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun target IKU yang ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Bapenda adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Target Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	4.06%	4.77%			

Sumber : Renstra Bapenda Kab. Banggai 2023 - 2026

Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	31,29%		

Rencana kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Rencana Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan perencanaan, penatausahaan keuangan dan capaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bapenda	100%	100%	100%	Bapenda
1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan yang berkualitas	100%	100%	99,07%	Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	99,07%	Sekretariat
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan yang berkualitas	100%	100%	92,37%	Sekretariat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	27 Orang	27 Orang	96,09%	Sub. Bag. Keuangan dan aset, Sekretariat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tambahan penghasilan, biaya pemungutan pajak dan biaya insentif pemungutan pajak daerah	1 Tahun	1 Tahun	88,24%	Sub. Bag. Keuangan dan aset, Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tepat waktu				
1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian yang berkualitas	100%	100%	100%	Sekretariat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	1 Orang	1 Orang	100%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi umum yang berkualitas	100%	100%	97,89%	Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 Jenis	10 Jenis	100%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor dan alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	94,75%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	6370 Liter	6370 Liter	99,89%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan, penggandaan dan penjilidan	32 Paket	32 Paket	64,10%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	67,50%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 Laporan	1 Laporan	83,21%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		23 Unit	23 Unit	97,96%	Sekretariat
	Pengadaan Mebel		23 Unit	23 Unit	97,96%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Bapenda	100%	100%	96,95%	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah berkas surat yang diproses	2 Laporan	2 Laporan	99,03%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening internet, air dan listrik yang dibayarkan	3 Laporan	Laporan	96,38%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	2 Laporan	2 Laporan	96,99%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan BMD Bapenda	100%	100%	98,05%	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	98,40%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	11 Unit	11 Unit	100%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 Unit	2 Unit	97,69%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
III.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rp 58.571.939.076,17	Rp 49.689.910.252,30	84,84%	Bapenda

3.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rp 7.038.725.000,00	6.401.606.270,25	90,95%	Bid. Pendapatan I & Bid. Pendapatan II
	2. Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Rp 2.315.684.000,00	Rp 1673668730,73	72,28%	Bid. Ret. Daerah, Pendapatan daerah lainnya & Penyelesaian keberatan
	3. Persentase Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	4.231.000.000,00	Rp 5.264.033.585,00	124,42%	Bid. Ret. Daerah, Pendapatan daerah lainnya & Penyelesaian keberatan
	4. Persentase Realisasi Penerimaan Lain – lain PAD yang Sah	Rp 44.986.530.076,17	Rp 36.350.601.666,00	80,80%	Bid. Ret. Daerah dan lainlain PAD yang sah
Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan pajak daerah	7 Kegiatan	7 Kegiatan	94,92%	Bapenda
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		9 Dokumen	9 Dokumen	67,75%	4 Bidang, Sekretariat
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	3 Unit	3 Unit	95,49%	4 Bidang, Sekretariat
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah dokumen data registrasi wajib pajak berdasarkan wajib pajak	2 Laporan	2 Laporan	98,84%	4 Bidang, Sekretariat
Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	Jumlah Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	99,93%	4 Bidang, Sekretariat
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	88,58%	4 Bidang, Sekretariat
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	99,89%	4 Bidang, Sekretariat
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	83,92%	4 Bidang, Sekretariat

Sumber : Dokumen RKT Bapenda tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah bentuk pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun selama tahun 2024 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian kinerja bermaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah mengacu pada dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 – 2026. Penyajian lembaran Perjanjian Kinerja (PK) tersebut terdapat pada lampiran dokumen ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Akuntabilitas kinerja diukur dari Indikator Kinerja melalui Pengukuran sasaran, digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Pengukuran dimaksud merupakan suatu penilaian (assessment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan (Input), keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (Impact). Pengukuran tersebut sebagai rujukan untuk mengukur kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya, analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi tahun berikutnya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja.

3.1.1 Capaian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan angka yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja utama Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan. Target capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja. Pengukuran kinerja terletak pada pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah yang disajikan dalam persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menggunakan rumus Indikator Kinerja di bawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Target, realisasi dan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 9. berikut :

Table 9. Target dan Capaian IKU Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	58.571.939.076,17	51.438.417.935,86	87,82
2	Nilai SAKIB	B	B	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	76 – 61		

Tabel 9. Target dan Realisasi PAD Tahun 2024

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Target	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Pajak Daerah	7,038,725,000,00	6,401,606,270,25	90,95
2.	Retribusi Daerah	2,315,684,000,00	1,673,668,730,73	72,28
3.	Kekayaan yang Dipisahkan	4,231,000,000,00	5,269,033,585	124,53
4	Lain – lain PAD yang Sah	<u>44,986,530,076,17</u>	<u>36,350,601,666</u>	<u>80,80</u>
	Total PAD	58,571,939,076,17	51,438,417,935,86	87,82

Sumber : Data Diolah dari Laporan PAD Tahun 2023

Pada tahun 2024, target PAD Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan sebesar Rp 58.571.939.076,17 (Lima Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Enam Ribu koma Tujuh Belas Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 51.438.417.935,86 (Lima Puluh Satu Milyart Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Delapan Puluh Enam Rupiah) atau capaian sebesar 87,82% (Delapan Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Dua persen).

Pertumbuhan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Pertumbuhan PAD Tahun 2023 s.d 2024

No.	JenisPAD	Realisas(Rp)		Growth (%)
		2023	2024	
1.	Pajak Daerah	6.627.562.442,85	6,401,606,270,25	-3,42
2.	Retribusi Daerah	13.859.764.577,00	1,673,668,730,73	-87,92
3.	Kekayaan yang Dipisahkan	4.231.364.872,00	5,264,033,585,00	24,41
4.	Lain – lain PAD yang Sah	<u>19.695.030.818,70</u>	<u>36.350.601.666,00</u>	<u>84,57</u>
	Jumlah	44.413.722.710,55	51,438,417,935,86	15,82

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi PAD tahun 2023 s.d 2024

Jika dilihat dari persentase peningkatan realisasi Pajak Daerah tahun 2024 yang ditetapkan 31,29% dari realisasi tahun sebelumnya, dimana realisasi PAD pada tahun 2023 adalah Rp 44.413.722.710,55 (Empat puluh empat milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh lima koma lima puluh lima rupiah), maka capaian pertumbuhan PAD tahun 2024 mengalami penurunan 15,82%

Realisasi PAD terdiri dari beberapa sumber pendapatan dengan masing – masing persentase pertumbuhan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Rincian realisasi masing – masing jenis Pajak Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024

No.	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	PBJT Jasa Perhotelan	115.000.000,00	168.076.427,00	146,15
2.	PBJT Makanan dan atau/Minuman	1.298.225.000,0	1.131.639.972,20	87,17
3.	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	5.000.000,00	925.000,00	18,50
4.	Pajak Reklame	59.000.000,00	33.144.944,05	56,18
5.	PBJT Tenaga Listrik	2.600.000.000,00	2.632.732.690,00	101,26
6.	PBJT Jasa Parkir	500.000,00	736.000,00	147,20
7.	Pajak Air Tanah	1.000.000,00	2.316.471,00	231,65
8.	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	0	0
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.400.000.000,00	845.302.902,00	60,38
10.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2)	1.455.000.000,00	1.473.900.093,00	101,30
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	100.000.000,00	112.855.591,00	112,86
12.				
	Jumlah	7.038.725.000,00	6.401.603.270,25	90,95

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi PAD tahun 2024

Berdasarkan tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di atas, dapat diketahui bahwa masing – masing jenis Pajak Daerah mencapai angka realisasi yang bervariasi dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebesar Rp. 6.401.603.270,25 (Enam Milyar Empat Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Koma Dua Puluh Lima Rupiah) atau 90,95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 7.038.725.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu).

Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi (Rp)		Growth (%)
		2023	2024	
1.	Pajak Hotel/ PBJT Jasa Perhotelan	128.451.700,10	168.076.607,00	30,85
2.	Pajak Restoran/PBJT Makanan dan atau/Minuman	1.154.432.902,59	1.131.496.331,20	-1,99
3.	Pajak Hiburan /PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	1.875.000,00	925.000,00	-50,65
4.	Pajak Reklame	36.584.483,00	33.144.944,05	-9,40
5.	Pajak Penerangan Jalan /PBJT Tenaga Listrik	2.793.562.564,00	2.632.735.690,00	-5,76
6.	Pajak Parkir /PBJT Jasa Parkir	0	735.000,00	0
7.	Pajak Air Tanah	1.084.000,00	2.316.471,00	113,70
8.	Pajak Sarang Burung Walet	0	0	0
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.038.461.988,75	845.272.902,00	-18,60
10.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2)	1.409.170.895,00	1.473.900.093,00	4,59
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	63.938.910,00	112.855.591,00	76,51
	Jumlah	6.627.562.442,85	6.401.603.270,25	-3,41

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi PAD tahun 2023 s.d 2024

Jika dilihat dari persentase peningkatan realisasi Pajak Daerah yang ditetapkan 31,29% dari realisasi tahun sebelumnya, dimana realisasi Pajak Daerah pada tahun 2023 adalah Rp 6.627.562.442,85 (Enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua koma delapan puluh lima rupiah), maka capaian Pajak Daerah tahun 2024 mengalami penurunan -3,41%.

Capaian realisasi pada tahun 2024 tidak lepas dari faktor penentu keberhasilan atau ketidakberhasilan pengelolaan Pajak Daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah masih banyak masalah/kendala yang sering dihadapi baik internal maupun eksternal sehingga menyebabkan pencapaian realisasi Pajak Daerah tidak sesuai harapan. Masalah/kendala tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

- Kurangnya data dalam menggali potensi pendapatan Pajak Daerah;
- Terbatasnya inovasi dan kemampuan petugas pajak dalam mengelola administrasi perpajakan;
- Kurangnya jumlah personil pengelola Pajak Daerah;
- Lemahnya pengoperasian dan pengawasan teknologi informasi yang tersedia;
- Kurangnya tingkat pemenuhan kebutuhan akan Teknologi informasi untuk Bapenda sebagai pengelola dan Wajib Pajak.

b. Faktor Eksternal

- Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap aturan perpajakan yang berlaku;
- Kurangnya tingkat Wajib Pajak terhadap manfaat pajak untuk pembangunan daerah;
- Kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya sehingga banyak Wajib Pajak yang bersikap abai terhadap kewajiban perpajakan dan cenderung menghindarinya;

Sebagai perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bapenda adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah tahun 2022 mencapai 11,74%.
2. Pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah tahun 2023 mencapai 5,34%
3. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah tahun 2024 mencapai - 3,41% capaian ini menjelaskan bahwa target indikator kinerja yang ditetapkan tidak dapat dicapai atau bahkan mengalami penurunan kinerja

Jika pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah dirata – ratakan selama periode Renstra 2022–2026, maka pertumbuhan setiap tahunnya adalah 13,67%.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri dari beberapa jenis yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berwenang atas pengelolaan masing – masing jenis retribusi dan pengelolaannya diawasi oleh Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun OPD yang berwenang atas pengelolaan Retribusi Daerah adalah Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas koperindag, Dinas Komunukasi dan informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan. Rincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024

No	Jenis Retribusi	Target (RP)	Realisasi	
			Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	400.000.000,00	360.028.000,00	90,01
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	171.000.000,00	181.462.000,00	106,12
3	Retribusi Pelayanan Pasar	358.184.000,00	254.845.000,00	71,15
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Pemakaian Laboratorium	150.000.000,00	0	0
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Alat Berat	520.000.000,00	159.011.676,00	30,58

6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :Bapenda	259.000.000,00	311.175.214,73	120,14
7	Ret. Tempat Khusus Parkir	2.000.000,00	0	0
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	270.000.000,00	201.834.750,00	74,75
9	Retribusi Penyebrangan Orang / Penyebrangan diatas Air	10.000.000,00	21.540.000,00	215,40
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	20.771.000,00	103,85
11	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100.000.000,00	103.900.000,00	103,90
12	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	500.000,00	500.000,00	100,00
13	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Bibit Tanaman	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00
14	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	50.000.000,00	14.347.000,00	28,69
15	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		40.254.090	-
	Jumlah	2.315.684.000,00	1.673.668.730,73	72,28

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi PAD tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 mencapai angka persentase yang bervariasi, mulai dari persentase terendah 0% (tidak terealisasi) hingga mencapai 215,40% (melampaui target). Secara umum realisasi Retribusi Daerah adalah Rp 1.673.668.730,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atau 72,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.315.684.000,00 (Dua milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu). Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan

Pertumbuhan retribusi Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 s.d 2024

No	Jenis Retribusi	Realisasi (Rp)		Growth (%)
		2023	2024	
3	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	330.069.000,00	360.028.000,00	9,08
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	138.315.000,00	181.462.000,00	31,19
5	Retribusi Pelayanan Pasar	261.500.000,00	254.845.000,00	-2,94
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Pemakaian Laboratorium	0	0	
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Sewa alat berat (PU)	253.798.739,00	159.011.676,00	-37,35
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (penyewaan tanah dan bangunan)	144.758.132,00	311.175.214,73	114,96
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	137.514.600,00	201.834.750,00	46,77
10	Retribusi Penyebrangan Orang / Penyebrangan diatas Air	9.579.500,00	21.540.000,00	124,86
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	21.957.000,00	20.771.000,00	-5,40
12	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	51.811.000,00	103.900.000,00	100,54
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,	0	500.000,00	0

	Pariwisata dan Olahraga			
14	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Bibit Tanaman	0	4.000.000	0
15	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	59.316.000,0	14.347.000,00	-75,81
	Jumlah	13.859.764.577,00	1.673.668.730,73	-87,92

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi PAD tahun 2022 s.d 2023

Jika dilihat dari persentase peningkatan realisasi Retribusi Daerah yang ditetapkan 31.29% dari realisasi tahun sebelumnya, dimana realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2023 adalah Rp **13.859.764.577,00** (Tiga belas milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), maka capaian Retribusi Daerah tahun 2024 kurang dari angka yang ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja Bapenda. Capaian kinerja dari Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar -87,92%.

Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi realisasi Retribusi Daerah tersebut, yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman pengelola retribusi dan wajib retribusi tentang aturan retribusi daerah yang berlaku dan tata cara pemungutannya;
- b. Rendahnya penggalian potensi Retribusi Daerah karena data potensi yang kurang maksimal;
- c. Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Retribusi Daerah;
- d. Sistem pengelolaan Retribusi Daerah yang diterapkan oleh OPD terkait belum memadai sehingga masih banyak potensi yang tidak tertagih;
- e. Banyaknya wajib retribusi yang belum patuh terhadap kewajibannya;

- f. Belum optimalnya penerapan regulasi yang ada berkaitan dengan pemberian sanksi tegas terhadap Wajib Retribusi yang tidak patuh.

Sebagai perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bapenda adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah tahun 2022 adalah 14,64%, capaian ini menjelaskan bahwa target indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai.
2. Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tahun 2023 adalah -25,45% capaian ini menjelaskan bahwa target indikator kinerja yang ditetapkan mengalami penurunan.
3. Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah tahun 2024 adalah -87,92% capaian ini menjelaskan bahwa target indikator kinerja yang ditetapkan mengalami penurunan.

Dari pertumbuhan realisasi tersebut, memperlihatkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun selama periode Renstra Bapenda, dengan rata – rata pertumbuhan -98,73% per tahun. Untuk itu, pada periode Renstra berikutnya diharapkan adanya peningkatan pertumbuhan pendapatan Retribusi Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Banggai adalah bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh PT. Bank Sulawesi Tengah, Bagian Laba dari PDAM. Realisasi dari salah satu PAD tersebut dapat dilihat pada Tabel 12. berikut :

Tabel 15. Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024

No	Jenis Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Target	Realisasi	
		(Rp)	Rp	%
1	Bagian Laba dari Bank Sulteng	4.206.000.000,00	5.234.033.585,00	124,44
2	Bagian Laba dari PDAM	25.000.000,00	35.000.000,00	140,00
	Jumlah	4.231.000.000,00	5.269.033.585,00	124,53

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi PAD tahun 2024

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 mencapai Rp 5.269.033.585,00 (Lima milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau 124,53% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 4.231.000.000,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah). Realisasi dari sumber pendapatan ini dapat dikatakan mengalami pelampauan.

Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16.
Pertumbuhan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 s.d 2024

No	Jenis Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Realisasi (Rp)		Growth (%)
		2023	2024	
1	Bagian Laba dari Bank Sulteng	4.206.364.872,00	5.234.033.585,00	24,43
2	Bagian Laba dari PDAM	25.000.000,00	35.000.000,00	40,00
	Jumlah	4.231.364.872,00	5.269.033.585,00	24,52

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi PAD tahun 2023 s.d 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 4.231.364.872,00 (Empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu koma delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 meningkat 24,52% atau melampaui target kinerja yang ditetapkan.

4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari Hasil Penerimaan BMD yang tidak dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Krugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Dari Pengembalian, Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Rincian realisasi yang diperoleh dari Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagaimana pada halaman berikut :

Tabel 17. Target dan Realisasi Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024

No	Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Target	Realisasi	
			Rp.	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan	100.000.000,00	32.341.490,88	32,34
	Hasil Pemanfaatan BMD	30.000.000,00	64.874.000,00	216,25
	Penerimaan Jasa Giro	2.010.000.000,00	740.176.217,00	36,82
6	Pendapatan Bunga	889.447.269,00	1.440.169.694,00	161,92
7	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Krugian Keuangan Daerah	5.000.000.000,00	499.714.741,00	9,99
8	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	457.974.788,00	
	Pendapatan Denda Pajak	498.186,00	10.310.853,00	2070
9	Pendapatan Dari Pengembalian	415.776.357	614.159.057	147,71
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.700.000,00	66.788.646	1421
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.000.000	40.599.732	811,99
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	17.000.000	35.000.000,00	205,88
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	42.272.000,00	50.466.845,74	119,39
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial - Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya	193.401.000,00	215.111.000,00	111,23
15	Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0	226.294.260,28	0
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	218.785.248,17	317.783.964,98	145,25
17	Pendapatan dari Pengembalian	16.000.000,00	41.000.000,00	256,25

	kelebihan pembayaran Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Jalan dan Jembatan			
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi – Jaringan	21.434.450,00	24.434.450,00	100
19	Penerimaan Pengembalian pengadaan Mangrove TA 2014 CV Wajo Sederhana	0	5.000.000	0
	Pendapatan Sedekah	35.134.710	35.134.710	100
20	Pendapatan BLUD	35.987.080.856,00	33.184.777.889,00	92,21
	Jumlah	44.986.530.076,17	38.094.112.349,88	84,68

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi PAD tahun 2024

Tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 Rp 38.094.112.349,88. (Tiga puluh delapan milyar sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh Sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) atau 84,68% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 44.986.530.076,17 (Empat puluh empat milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh puluh enam koma tujuh belas rupiah). Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan.

Pertumbuhan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Pertumbuhan Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024

No	Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Yang Syah	Realisasi (Rp)		Growth (%)
		2023	2024	
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	337.200.800,00	32.341.490,88	-90,41
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	24.986.000,00	64.874.000,00	159,64
3	Penerimaan Jasa Giro	1.327.403.475,00	740.176.217,00	-44,24
4	Pendapatan Bunga	105.999.434,00	1.440.169.694,00	1258,66
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Krugian Keuangan Daerah	1.366.927.685,39	499.714.742,00	-63,44
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	820.598.213,68	457.974.788,00	-44,19
7	Pendapatan denda pajak	17.406.452,30	10.310.863,00	-40,76
8	Pendapatan Dari Pengembalian	1.838.229.243,33	614.159.057	-66,59
9	Pendapatan BLUD	13.856.279.515,00	33.184.777.889,00	139,49
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0	40.599.732	0

11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0	35.000.000	0
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0	50.466.845,74	0
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial - Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya	0	215.111.000	0
14	Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0	226.294.260,28	0
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	0	317.783.964,98	0
16	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Jalan dan Jembatan	0	41.000.000	0
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - Jaringan	0	21.434.450	0
J u m l a h		19.695.030.818,70	38.094.112.349,88	93,42

Sumber : Data diolah dari Laporan Realisasi PAD tahun 2023 s.d 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 19.695.030.818,70 (Sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh ribu delapan ratus delapan belas koma tujuh puluh rupiah), capaian Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 meningkat 93,42%.

3.1.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan indikator dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan juga merupakan representasi dari keberhasilan/kegagalan Indikator Kinerja Individu (IKI) jajaran Eselon III dan IV. Berikut tabel capaian kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024:

Tabel 19. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung Jawab
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pemenuhan perencanaan, penatausahaan keuangan dan capaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bapenda	100%	100%	100%	Bapenda
1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan yang berkualitas	100%	100%	99,07%	Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	99,07%	Sekretariat
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan yang berkualitas	100%	100%	93,08%	Sekretariat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	27 Orang	27 Orang	96,09%	Sub. Bag. Keuangan dan aset, Sekretariat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tambahan penghasilan, biaya pemungutan pajak dan biaya insentif pemungutan pajak daerah	1 Tahun	1 Tahun	88,24%	Sub. Bag. Keuangan dan aset, Sekretariat
1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian yang berkualitas	100%	100%	100%	Sekretariat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	1 Orang	1 Orang	100%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi umum yang berkualitas	100%	100%	87,37%	Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 Jenis	10 Jenis	100%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor dan alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	94,75%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	6370 Liter	6370 Liter	99,89%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan, penggandaan dan penjilidan	32 Paket	32 Paket	64,10%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	67,50%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 Laporan	1 Laporan	83,21%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		23 Unit	23 Unit	97,96%	Sekretariat
	Pengadaan Mebel		23 Unit	23 Unit	97,96%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Bapenda	100%	100%	96,95%	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah berkas surat yang diproses	2 Laporan	2 Laporan	99,03%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening internet, air dan listrik yang dibayarkan	3 Laporan	Laporan	96,38%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	2 Laporan	2 Laporan	96,99%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan BMD Bapenda	100%	100%	98,05%	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	98,40%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki	11 Unit	11 Unit	100%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 Unit	2 Unit	97,69%	Sub. Bag. Umum dan Kepeg., Sekretariat
III.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rp 58.571.939.076,17	Rp 51.438.417.935,86	87,82%	Bapenda

3.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rp 7.038.725.000,00	6.401.606.270,25	90,95%	Bid. Pendapatan I & Bid. Pendapatan II
	2. Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Rp 2.315.684.000,00	Rp 1673668730,73	72,28%	Bid. Ret. Daerah, Pendapatan daerah lainnya & Penyelesaian keberatan
	3. Persentase Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	4.231.000.000,00	Rp 5.269.033.585,00	124,53%	Bid. Ret. Daerah, Pendapatan daerah lainnya & Penyelesaian keberatan
	4. Persentase Realisasi Penerimaan Lain – lain PAD yang Sah	Rp 44.986.530.076,17	Rp 38.094.112,00	84,68%	Bid. Ret. Daerah dan lainlain PAD yang sah
Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan pajak daerah	7 Kegiatan	7 Kegiatan	94,92%	Bapenda
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		9 Dokumen	9 Dokumen	67,75%	4 Bidang, Sekretariat
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	3 Unit	3 Unit	95,49%	4 Bidang, Sekretariat
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah dokumen data registrasi wajib pajak berdasarkan wajib pajak	2 Laporan	2 Laporan	98,84%	4 Bidang, Sekretariat
Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	Jumlah Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	99,93%	4 Bidang, Sekretariat
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan	88,58%	4 Bidang, Sekretariat
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	99,89%	4 Bidang, Sekretariat
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	83,92%	4 Bidang, Sekretariat

Sumber : Dokumen RKT Bapenda tahun 2024

Kinerja program dan kegiatan pada tabel di atas menunjukkan angka realisasi kinerja individu dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dan diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Perjanjian kinerja memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, target yang harus dicapai dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Tidak semua Sub kegiatan memenuhi pencapaian yang diharapkan sesuai target kinerja Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan. Namun demikian, keberhasilan tersebut masih terbatas pada keluaran (output) sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam agar diperoleh hasil (outcome) yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Capaian program/kegiatan Bapenda Kabupaten Banggai sebagai Indikator Kinerja Individu (IKI) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dengan target masing – masing 1 dokumen. Dalam pelaksanaan sub kegiatan ini menghasilkan 2 dokumen sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikatornya adalah Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan dengan target Gaji dan Tunjangan untuk 27 Orang ASN.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, indikatornya adalah jumlah tambahan penghasilan, biaya pemungutan pajak dan biaya insentif pemungutan pajak daerah dengan target pembayaran selama 1 Tahun. Untuk Insentif Pajak Daerah tidak dapat dilaksanakan keseluruhan karena capaian realisasi tidak mencapai target.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD, indikatornya adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tepat waktu dengan target 2 dokumen. dari target yang ditetapkan.

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, indikatornya adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan dengan target 1 Orang, dan dalam pelaksanaan anggaran hanya 1 orang yang mengikuti Diklat PIM III.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikatornya adalah Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan Kantor dengan target 10 Paket, telah dilaksanakan 100% sesuai target untuk belanja komponen listrik yang dibutuhkan pada kantor Bapenda.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikatornya adalah Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Alat Tulis Kantor dengan target 4 Paket, dilaksanakan sebagaimana target dengan capaian kinerja 94,75%.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, indikatornya adalah jumlah makanan dan minuman yang disediakan dengan target 3.185 Liter, terlaksana 99,89% sebagaimana target.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, indikatornya adalah Jumlah Cetak, Penggandaan dan Penjilidan yang Disediakan dengan target 5 Paket, telah dilaksanakan sesuai target kinerja dengan capaian 64,10%.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikatornya adalah Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dengan target 1 Laporan. Selama Tahun 2024 Perjalanan Dinas dilaksanakan hanya 83,21 % dari total target.
- Pengadaan Mebel, indikatornya adalah jumlah pengadaan mebel yang direncanakan dengan target 23 unit, pelaksanaannya mencapai 97,96% dari target yang ditetapkan.

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikatornya adalah jumlah berkas surat yang diproses dengan target 2 laporan. Pelaksanaanya mencapai 99,03% dari target yang ditetapkan.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikatornya adalah jumlah rekening internet, air dan listrik yang dibayarkan dengan target 3 jenis. Pelaksanaanya sesuai dengan target dengan capaian 96,38%.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, indikatornya adalah jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran dengan target 2 Laporan. Pelaksananya sesuai dengan target dengan capaian 96,99%.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikatornya adalah jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dengan target 6 unit. Pelaksanaanya sesuai dengan target dengan capaian 98,40%.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikatornya adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperbaiki dengan target 11 Unit. Pelaksanaanya sesuai dengan target dengan capaian 100%.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target 2 unit 97,69%
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Indikatornya adalah Jumlah dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta pengembangan pajak daerah dan retribusi pajak daerah dengan target 9 Dokumen. Dalam pelaksanaan sub kegiatan telah melaksanakan 9 dokumen pelaksanaan sesuai target dengan capaian 67,75%
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, indikatornya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan target 1 unit. Dalam pelaksanaan sub kegiatan telah melaksanakan 1 kegiatan pelaksanaan sesuai target dengan capaian 95,49%.

- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, indikatornya adalah Jumlah Dokumen Data Registrasi Wajib Pajak Berdasarkan Objek Pajak dengan target 1 laporan. sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan 98,84%.
- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah, indikatornya adalah Jumlah Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah dengan target 1 layanan, dengan capain 99,93%
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, indikatornya adalah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target 1 layanan, dengan capaian 88,58%
- Penagihan Pajak Daerah, indikatornya adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, dengan capaian 99,89%
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, indikatornya Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 83,92%

3.1.3 Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari masalah/kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diupayakan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi selama tahun 2024. Solusi yang diupayakan tersebut diharapkan mampu mengurangi kendala/masalah sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai angka realisasi yang diharapkan.

Adapun solusi yang telah di lakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun aturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan;
- b. Melakukan sosialisasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh terhadap aturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. Meningkatkan sarana/prasarana yang dibutuhkan demi kelancaran pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan kualitas petugas Pajak Daerah dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan formal yaitu pemeriksa Pajak Daerah dan penagih Pajak Daerah;
- e. Meningkatkan disiplin pegawai dengan memperketat absensi baik elektronik maupun manual;
- f. Memberikan “reward” dan “punishment” secara objektif dan proporsional;
- g. Pengadaan Teknologi Informasi untuk membantu memudahkan kerja aparatur;
- h. Mengupayakan penambahan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;

3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam proses pengelolaan pendapatan daerah, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya dimaksudkan untuk mendukung kelancaran optimalisasi pendapatan daerah sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Sumber daya yang dibutuhkan tersebut meliputi sumber daya biaya dan sumber daya aparatur.

Pada tahun 2024 realisasi belanja untuk semua program/kegiatan/sub kegiatan Bapenda Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Rp 6,365,946,182 sementara target biaya untuk semua program/kegiatan/sub kegiatan adalah Rp Rp 6,806,062,370. Jika melihat efisiensi penggunaan sumber daya biaya khususnya pada program/kegiatan/sub kegiatan pengadaan sarana / prasarana pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dikatakan sangat efisien. Sebab, sarana/prasarana yang diadakan cukup membantu optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah dan pengawasan Retribusi Daerah.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya aparatur telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh ASN dalam lingkup Bapenda guna mengoptimalkan pengelolaan Pajak Daerah mulai dari proses perencanaan pengelolaan pajak, pendataan dan pendaftaran pajak, penetapan pajak, pemeriksaan/verifikasi serta penagihan pajak. Untuk lebih mengefisiensikan SDM yang dimiliki, Bapenda mengikutsertakan ASN dalam pendidikan dan pelatihan formal dengan harapan ASN yang berkompeten dapat membantu proses pencapaian realisasi Pajak Daerah yang telah ditargetkan. Demikian juga dalam pencapaian target Retribusi Daerah, Bapenda melibatkan ASN sesuai tugas dan fungsinya guna mengoptimalkan pengawasan pengelolaan retribusi mulai dari pendataan, pengelolaan, dan penagihan Retribusi.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk pencapaian kinerja sebagaimana yang telah diuraikan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, perlu adanya dukungan dari aspek keuangan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan dana anggaran murni dan perubahan anggaran sebesar Rp 6,365,946,182 (Enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) untuk belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 5.962.552.370 (Lima milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 843.510.000 (delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah.) yang digunakan untuk membiayai belanja 2 (program) program, enam (enam) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Adapun rincian belanja daerah badan pendapatan daerah kabupaten banggai kepulauan tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 20. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Bapenda
Kab. Banggai Kepulauan
Tahun 2024

No.	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.027.800	49.563.800	99,07
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.059.507.000	1.978.926.877	96,09
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.278.088.450	1.127.760.594	88,24
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0
5.	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	29.139.000	29.139.000	100,00
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000	1.000.000	100,00
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	360.286.450	341.383.950	94,75
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.560.000	141.404.000	99,89
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.669.500	100.425.500	64,10
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	4.050.000	67,50
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.028.000	135.649.622	83,21
12.	Pengadaan Mebel	149.000.000	145.960.000	97,96
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.258.000	10.158.000	99,03
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.640.215	79.652.400	96,38
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.964.000	526.644.850	96,99
16.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	112.583.800	110.780.100	98,40
17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor	8.500.000	8.500.000	100,00
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	146.530.000	97,69
19.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	44.750.000	30.320.000	67,75
20.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	523.318.600	499.728.600	95,49
21.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	266.391.705	263.301.705	98,84
22.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	300.000.000	299.800.000	99,93
23.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	39.393.000	34.893.000	88,58
24.	Penagihan Pajak Daerah	141.729.000	141.579.000	99,89
25.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	189.227.000	158.795.184	83,92
Jumlah		6.806.062.370	6.365.946.182	93,53

Sumber : Laporan Indikator Kinerja Tahun 2024

Anggaran Belanja Daerah yang digunakan Badan Pendapatan daerah pada tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp 6.365.946.182 (Enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau 93,53% dari total Pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 6,806,062,370 (Enam milyar delapan ratus enam juta enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Angka realisasi tersebut secara umum dikategorikan baik karena Pagu anggaran dapat terealisasi dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada tingkat pemenuhan kebutuhan operasional dan sarana/prasarana penunjang terlaksananya kinerja Bapenda.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024, secara keseluruhan realisasi PAD sebesar 87,82% dari target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan sebesar 15,82% dari tahun 2023. Adapun capaian dari masing – masing sumber PAD dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebesar Rp 6.401.603.270,25 atau 90,95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 7.038.725.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 6.627.562.442,85, maka capaian pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2024 mengalami menurun -3,41%.
- b. Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 sebesar Rp 1.673.668.730,73 atau 72,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.315.684.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 13.859.764.577,00, maka capaian pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2024 mengalami penurunan yaitu -87,92%.
- c. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp 5.269.033.585,00 atau 124,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4.231.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 2.231.364.872,00, maka capaian pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 meningkat 24,52% atau melampaui target kinerja yang ditetapkan.
- d. Realisasi Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebesar Rp 38,094,112,349,88 atau 84,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 44.986.530.076,17. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 19.695.030.818,70, maka capaian pertumbuhan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 meningkat 93,42% melampaui target kinerja yang ditetapkan.

Anggaran belanja Bapenda pada tahun 2024 cukup efisien dalam pemanfaatannya. Anggaran Belanja Daerah yang digunakan mencapai realisasi sebesar Rp 6.365.946.182,00 atau 93,53% dari total Pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 6.806.062.370,00. Angka realisasi tersebut secara umum dikategorikan baik karena Pagu anggaran dapat terealisasi dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada tingkat pemenuhan kebutuhan operasional dan sarana/prasarana penunjang terlaksananya kinerja Bapenda.

4.2 Saran

Capaian target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024 memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat dan dunia usaha sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan dan landasan dalam merancang target penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Rancangan target penerimaan Pendapatan Daerah diharapkan mampu membuat terobosan – terobosan baru yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan penerimaan PAD tahun – tahun mendatang. Terobosan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM baik jumlah personil maupun kompetensi untuk memenuhi kebutuhan Bapenda dalam pengelolaan Pajak Daerah dan pengawasan Retribusi Daerah yang baik dan terarah.
2. Meningkatkan sistem pengawasan Pajak Daerah/Retribusi Daerah secara online untuk mengurangi kecurangan;
3. Meningkatkan teknologi informasi pengelolaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan teknologi, melalui aplikasi transaksi elektronik Pajak Daerah/Retribusi Daerah agar memudahkan pengelolaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah baik petugas maupun masyarakat dalam melakukan pembayaran dan mengakses informasi melalui smartphone, terlebih berguna dalam pengelolaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah di masa akan datang;

4. Meningkatkan pelayanan yang lebih mendekatkan dan mempermudah bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana, terutama bangunan gedung kantor yang representative dan strategis.

**LAMPIRAN -
LAMPIRAN**